



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a telah memperoleh persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-13/2013 dan Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6911 Tahun 2013 dan telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 5 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT**

dan

**GUBERNUR JAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 17.641.552.420.964,20 bertambah sejumlah Rp. 2.654.918.004.440,00 sehingga menjadi Rp. 20.296.470.425.404,20 dengan rincian sebagai berikut:

<b>a. Pendapatan Daerah:</b>	
1. Semula	Rp. 16.651.601.834.434,20
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 728.561.835.556,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 17.380.163.669.990,20</b>
<b>b. Belanja Daerah:</b>	
1. Semula	Rp. 17.516.652.420.964,20
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 2.537.417.554.994,00
<b>Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. <u>20.054.069.975.958,20</u></b>
<b>Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. (2.673.906.305.968,00)</b>
<b>c. Pembiayaan Daerah:</b>	
<b>1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:</b>	
a Semula	Rp. 989.950.586.530,00
b Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.926.356.168.884,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 2.916.306.755.414,00</b>
<b>2. Pengeluaran Pembiayaan:</b>	
a Semula	Rp. 124.900.000.000,00
b Bertambah/ (berkurang)	Rp. 64.125.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. <u>189.025.000.000,00</u></b>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. <u>2.727.281.755.414,00</u></b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. 53.375.449.446,00</b>

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

<b>a. Pendapatan Asli Daerah:</b>	
1 Semula	Rp. 9.882.025.240.600,20
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 631.955.505.909,00
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp. 10.513.980.746.509,20</b>

**b. Dana Perimbangan:**

1 Semula	Rp. 2.583.041.104.821,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 158.209.256.179,00	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 2.741.250.361.000,00

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:**

1 Semula	Rp. 4.186.535.489.013,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. (61.602.926.532,00)	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 4.124.932.562.481,00

**(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:****a. Pajak Daerah:**

1 Semula	Rp. 9.142.139.000.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 572.773.691.000,00	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 9.714.912.691.000,00

**b. Retribusi Daerah:**

1 Semula	Rp. 57.327.135.485,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. (197.712.500,00)	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 57.129.422.985,00

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:**

1 Semula	Rp. 240.148.000.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 22.166.116.000,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp. 262.314.116.000,00

**d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:**

1 Semula	Rp. 442.411.105.115,20	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 37.213.411.409,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 479.624.516.524,20

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:
- |   |     |                      |                      |
|---|-----|----------------------|----------------------|
| 1 Semula  | Rp. | 1.030.516.043.821,00 |                      |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)   | Rp. | 158.209.256.179,00   |                      |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan | Rp. |                      | 1.188.725.300.000,00 |
- b. Dana Alokasi Umum:
- |  |     |                      |                      |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| 1 Semula                                   | Rp. | 1.472.453.011.000,00 |                      |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)                | Rp. | 0,00                 |                      |
| Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan | Rp. |                      | 1.472.453.011.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus:
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1 Semula                                     | Rp. | 80.072.050.000,00 |                   |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)                  | Rp. | 0,00              |                   |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan | Rp. |                   | 80.072.050.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah:
- |                                |     |                   |                   |
|--------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1 Semula                       | Rp. | 19.462.079.013,00 |                   |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)    | Rp. | 968.551.237,00    |                   |
| Jumlah Hibah Setelah Perubahan | Rp. |                   | 20.430.630.250,00 |
- b. Dana Darurat:
- |                                       |     |      |      |
|---------------------------------------|-----|------|------|
| 1 Semula                              | Rp. | 0,00 |      |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)           | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan | Rp. |      | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak:
- |  |     |      |      |
|--|-----|------|------|
| 1 Semula                                       | Rp. | 0,00 |      |
| 2 Bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp. | 0,00 |      |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp. |      | 0,00 |

<b>d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:</b>			
1 Semula	Rp.	4.167.073.410.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(62.571.477.769,00)	
<b>Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 4.104.501.932.231,00</b>
<b>e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:</b>			
1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>
<b>f. Lain-lain Penerimaan:</b>			
1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
<b>Jumlah Lain-lain Penerimaan Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 0,00</b>

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:

<b>a. Belanja Tidak Langsung:</b>			
1 Semula	Rp.	13.841.422.992.558,20	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.968.732.645.826,00	
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 15.810.155.638.384,20</b>
<b>b. Belanja Langsung:</b>			
1 Semula	Rp.	3.675.229.428.406,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	568.684.909.168,00	
<b>Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan</b>			<b>Rp. 4.243.914.337.574,00</b>



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1 Semula	Rp.	1.673.209.654.391,00		
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(25.000.000.000,00)		
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan			Rp.	1.648.209.654.391,00

b. Belanja Bunga:

1 Semula	Rp.			0,00
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.			0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan			Rp.	0,00

c. Belanja Subsidi:

1 Semula	Rp.	10.000.000.000,00		
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.			0,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan			Rp.	10.000.000.000,00

d. Belanja Hibah:

1 Semula	Rp.	5.350.065.225.090,00		
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	713.100.703.050,00		
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp.	6.063.165.928.140,00

e. Belanja Bantuan Sosial:

1 Semula	Rp.	25.500.000.000,00		
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(1.654.330.000,00)		
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan			Rp.	23.845.670.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1 Semula	Rp.	3.205.445.313.000,00		
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	879.022.781.705,88		
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp.	4.084.468.094.705,88

## g. Belanja Bantuan Keuangan:

1 Semula	Rp. 3.144.915.502.324,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 781.966.017.825,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan		Rp. 3.926.881.520.149,00

## h. Belanja Tidak Terduga:

1 Semula	Rp. 432.287.297.753,20	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. (378.702.526.754,88)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan		Rp. 53.584.770.998,32

## (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai:

1 Semula	Rp. 429.191.333.282,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 33.990.402.750,20	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan		Rp. 463.181.736.032,20

## b. Belanja Barang dan Jasa:

1 Semula	Rp. 2.053.579.857.147,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 204.962.961.805,89	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan		Rp. 2.258.542.818.952,89

## c. Belanja Modal:

1 Semula	Rp. 1.192.458.237.977,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 329.731.544.611,91	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan		Rp. 1.522.189.782.588,91

## Pasal 4

## (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari:

## a. Penerimaan:

1 Semula	Rp. 989.950.586.530,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.926.356.168.884,00	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 2.916.306.755.414,00

## b. Pengeluaran:

1 Semula	Rp.	124.900.000.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	64.125.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp.	189.025.000.000,00

## (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

## a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya:

1 Semula	Rp.	989.950.586.530,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	1.926.356.168.884,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Daerah Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan		Rp.	2.916.306.755.414,00

## b. Pencairan Dana Cadangan:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## d. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## f. Penerimaan Piutang Daerah:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

## a. Pembentukan Dana Cadangan:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1 Semula	Rp.	74.900.000.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	44.125.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp.	119.025.000.000,00

## c. Pembayaran Pokok Utang:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	0,00

## d. Dana Bergulir:

1 Semula	Rp.	50.000.000.000,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	20.000.000.000,00	
Jumlah Dana Bergulir Setelah Perubahan		Rp.	70.000.000.000,00

## e. BLUD:

1 Semula	Rp.	0,00	
2 Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah BLUD Setelah Perubahan		Rp.	0,00

### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

## Pasal 7

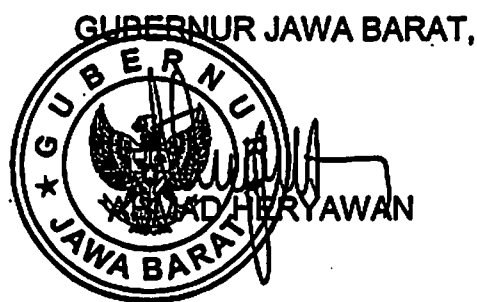
Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

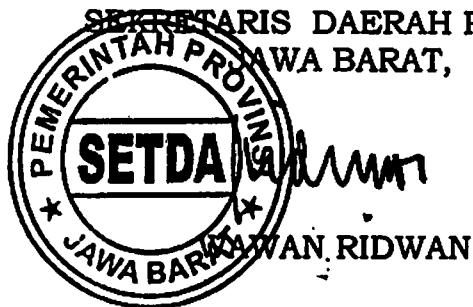
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Oktober 2013



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI ▲